

**RESTRUKTURISASI PERBANKAN NASIONAL MASA REFORMASI****FITRIAH HANIM**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-Mail : [fitriahhanim44@gmail.com](mailto:fitriahhanim44@gmail.com)

**Nasution**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**ABSTRAK**

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 menyebabkan kerugian di beberapa sektor, khususnya pada sektor perbankan. Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia merupakan bank yang dinilai tidak sehat dari segi keuangannya. Lemahnya permodalan bank dan kredit macet keempat bank menyebabkan keempat bank tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi perbankan yang salah satunya adalah melalui program merger bank. Oktober 1998 keempat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo dimerges menjadi satu menjadi Bank Mandiri.

Di dalam penelitian ini, hal yang menjadi perhatian peneliti adalah: 1. Bagaimana perbankan Indonesia sebelum restrukturisasi? 2. Bagaimana dampak program merger? Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan perbankan Indonesia sebelum restrukturisasi, dan menganalisis dampak program merger. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sejarah (*historical approach*), yang meliputi empat tahapan proses yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil dari penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori restrukturisasi perbankan yang digunakan untuk melihat perjalanan bank- bank sebelum dimerges, menunjukkan bahwa permodalan keempat bank yang pada tahun 1998 tumbuh negatif di bawah ketentuan permodalan yang ditetapkan BI sebesar 4%. BDN CARnya sebesar -79,30%, BBD CARnya sebesar -39,57%, Bank Exim CARnya sebesar -144,91%, dan Bapindo CARnya sebesar -30,44%. Serta rasio likuiditas (LDR) keempat bank pada tahun 1998 semuanya berada di atas 110%, mencerminkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya.

Setelah di merger Bank Mandiri melakukan PHK terhadap 26.000 pegawai menjadi 8.980 pegawai. Sehingga membawa kerugian bagi para pegawai keempat bank yang mendapatkan PHK sebelum waktunya. Selain dampak negatif yang ditimbulkan dari merger Bank Mandiri juga mencetak kinerja yang baik di perbankan Asia. Pada tahun 2000 Bank Mandiri memperoleh posisi tertinggi dengan menduduki peringkat 73. Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang dicapai oleh perbankan Indonesia.

**Kata Kunci** : Krisis Ekonomi, Kredit macet, Restrukturisasi

**ABSTRACT**

The economic crisis which was happened in Indonesia in 1997/1998 caused by some looses of several sectors, especially in the banking sector. The Trade of Country Bank, The Energy Of Earth Bank, Import Export Bank and Indonesia Development Bank are considered to be unhealthy banks in terms of their finances. The low modal of the bank and the bad debits of the four banks caused those banks to be unable to fulfill their obligations to their customers. Therefore, the government issued a policy of bank restructuration, one of which is through bank merger program. On October 1998, the four banks namely The Trade of Country Bank, The Energy Of Earth Bank, Import Export Bank and Indonesia Development joined into one as Mandiri Bank.

In this study, the researcher concerns in three problem, they are: 1. What is the Indonesian banking before the restructuring? 2. What is the merger program impact? The purpose of this research is to Indonesian banking before the restructuring, and to analyze the merger program impact. The method that used in this study is the historical approach, which includes four stages of the process namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

The results of the research analyzed using bank restructuration theories used to see the journey of banks before merging, indicate that the capital of the four banks in 1998 years grew negative under the terms of capital set by BI by 4%. BDN their CAR -79,30%, BBD their CAR -39,57%, Exim Bank their CAR -144,91%, and Bapindo their CAR -30,44%. As well as the liquidity ratio (LDR) of all four banks in 1998 were all above 110%, reflecting that the Third Party Fund (DPK) collected by banks is smaller than the distributed credits, so the banks use interbank funds to finance their credit.

After the merger, Mandiri Bank laid off 26,000 employees to become 8,980 employees. So it brings losses for employees of the four banks who get layoff prematurely. In addition to the negative impacts of the merger, Mandiri Bank also performed well in Asian banking. In 2000, Mandiri Bank achieved the highest position with a rating of 73. The rating is the highest rating achieved by Indonesian banks.

**Keywords: Economy Crisis, Bad Debt, Restructuration**

**PENDAHULUAN**

Krisis moneter tahun 1997 yang disebabkan karena kepanikan finansial sehingga berpengaruh pada kondisi ekonomi baik dari sektor perbankan maupun sektor riil, dan kelemahan struktural. Sehingga dari situlah jumlah nilai mata uang rupiah mulai bergejolak dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan moneter untuk menstabilkan kembali nilai tukar rupiah. Langkah yang diambil pemerintah untuk hal tersebut adalah dengan memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli dari Rp 192 (8%) menjadi Rp 304 (12%), melakukan pengetatan likuiditas, menaikkan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan melahirkan kebijakan uang ketat dengan tujuan untuk menstabilkan kurs dan moneter.<sup>1</sup>

Dampak dari kebijakan tersebut adalah beberapa bank kesulitan untuk melakukan likuiditas.<sup>2</sup> Akhirnya pada September 1997 pemerintah melonggarkan likuiditas masyarakat dan menurunkan suku bunga SBI. Tetapi yang terjadi di masyarakat adalah adanya rumor bahwa beberapa bank ada yang kalah kliring, rugi transaksi valas, larinya bankir ke luar negeri dan sebagainya<sup>3</sup> sehingga yang terjadi di

<sup>2</sup> Lihat daftar istilah.

<sup>3</sup> Masalah- masalah perbankan yang disebutkan diatas membuat masyarakat resah untuk menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut dirasa wajar karena kabar yang terdengar di masyarakat mengenai perbankan tidak seharusnya menimbulkan kepanikan jika nasabah tersebut mengetahui penerapan kebijakan maupun masalah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh bank- bank. Misalnya kebijakan likuidasi yang akhirnya menyebabkan masyarakat mengambil dananya maupun masalah bank yang mereka kalah kliring. Dari kaca mata perbankan sendiri hal tersebut sudah wajar terjadi tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan masalah yang dihadapi perbankan sehingga menimbulkan masalah berupa *rush* atau penarikan besar- besaran tersebut. Selain karena

<sup>1</sup> Agus Budiarto, *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat- Akibat Hukumnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 50.

masyarakat adalah masyarakat kehilangan kepercayaan untuk menyimpan uangnya di bank sehingga terjadi *rush* besar- besaran.<sup>4</sup>

Oktober 1999 untuk menangani hal tersebut pemerintah meminta bantuan kepada IMF untuk merestrukturisasi perbankan Indonesia. Setelah terjadi kesepakatan tersebut akhirnya 16 bank swasta dicabut izin usahanya. Tetapi, hal tersebut menyebabkan keresahan lagi dimasyarakat akan adanya likuidasi tahap kedua, sehingga terjadi penarikan besar-besaran nasabah kepada bank.<sup>5</sup> Hal tersebut kemudian memaksa bank- bank untuk meminta bantuan likuiditas atau BLBI (Bantuan likuiditas Bank Indonesia) dengan tujuan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, tetapi kemudian beberapa bank melanggar aturan sehingga dana awal yang disediakan oleh BI membengkak jumlahnya.<sup>6</sup>

Faktor lain keterpurukan perbankan di Indonesia adalah ditolaknya L/C perbankan nasional di luar negeri, barang ekspor impor yang akhirnya menyebabkan macetnya sektor riil perekonomian Indonesia. Selain dari faktor perbankan sendiri faktor lain yang mempengaruhi adalah kondisi politik Indonesia. Sehingga hal tersebut berdampak pada pencairan dana yang dikeluarkan oleh IMF. Selain banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas banyak bank yang kemudian saling bekerjasama untuk melakukan merger.<sup>7</sup>

---

kepanikan yang ditimbulkan dari nasabah yang kurang memahami tentang permasalahan yang sebenarnya di tubuh perbankan. Dari pihak perbankan sendiripun yang kurang terbuka dalam hal transparansi dana, sehingga hal- hal tersebut membuat masyarakat kurang percaya jika menyimpan dananya di bank. Hal tersebut juga berdampak pada bank- bank yang tidak termasuk dalam bank yang bermasalah atau bank yang tergolong masih sehat. Bank yang masih sehat juga mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Soedrajat, Djwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, (Jakarta: PT LP3ES Indonesia, 2001), hlm. 58.

<sup>4</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 170.

<sup>5</sup> Agus Budianto, *Op.cit.*, hlm. 51.

<sup>6</sup> Soehandjono dan Associates, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 10.

<sup>7</sup> Agus budianto, *Op.cit.*, hlm. 76.

Dikeluarkannya peraturan merger di Indonesia menjelang Pakto 88<sup>8</sup> jumlah bank yang dimerger sebanyak 66 bank yang diawali oleh Panin Bank, dalam perkembangan selanjutnya tepatnya yaitu tahun 1998 pemerintah menetapkan kebijakan untuk memmergerkan beberapa bank (BUMN) menjadi bank baru. Terdapat 10 bank yang akhirnya dimerger. Merger tahun 1998 tersebut diawali oleh penggabungan keempat bank yaitu Bank EXIM, BDN, BBD, dan Bapindo yang akhirnya bernama Bank Mandiri.<sup>9</sup>

Kebijakan pemerintah untuk melaukan merger dikarenakan rasio keuangan bank yang menurun. Sehingga bank- bank tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap nasabah. Dengan ditetapkannya merger diharapkan dapat meningkatkan kinerja, menciptakan bank yang lebih baik yang akhirnya memberikan dampak yang baik pula bagi sistem perbankan dan sistem perekonomian.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai kajian diatas, maka penelitian yang menjelaskan tentang restrukturisasi perbankan Nasional masa reformasi menjadi tema yang menarik. Adapun penelitian ini membahas (1) perbankan Indonesia sebelum restrukturisasi; (2) dampak dilaksanakannya program merger.

## METODE

Penelitian tentang restrukturisasi perbankan Nasional masa reformasi menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat langkah proses penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Pada tahap

---

<sup>8</sup> Pakto 88 merupakan paket kebijakan oktober 1988 yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan untuk mendirikan bank swasta baru, memberikan kemudahan bank yang sehat untuk membuka cabang, memberikan izin kepada bank asing untuk beroperasi di luar Jakarta, persyaratan cadangan bank komersial dari 15 % menjadi 2 % dan memperbolehkan BUMN untuk menyimpan 50 % dananya kepada bank swasta nasional. Hadi, Soesastro Dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 25.

<sup>9</sup> Agus budianto, *Op.cit.*, hlm 77.

<sup>10</sup> Neni sri imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: refika Aditama, 2010), hlm 163.

*heuristik* atau penelusuran sumber, peneliti memperoleh sumber sekunder berupa sumber dokumen berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU), yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 Tentang Bank Bumi Daya, Undang-undang No 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara, UU No. 22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor (Exim), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Sumber berupa koran, yaitu koran Surabaya Post yang terbit pada 18 Desember 1999, Surabaya Post yang terbit pada 12 September 2000, Surabaya Post yang terbit pada 18 Desember 2000, Surabaya Post yang terbit pada 22 Februari 2000, dan Bisnis Indonesia yang terbit pada 14 Mei 2001.

Sumber buku yang terkait dengan topik seperti: *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat- Akibat Hukumnya, Manajemen Perbankan, dan Pemasaran Perbankan*.

Tahap kedua yaitu *kritik sumber*, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kritik intern saja karena kritik intern merupakan kritik yang digunakan untuk menguji kevalidan isi atau kandungan sumber.<sup>11</sup> Pada tahap kritik intern, peneliti melakukan uji validitas terhadap beberapa sumber baik sumber primer maupun sekunder yang diperoleh, dalam upaya penulisan sejarah tentang “*Restrukturisasi Perbankan Nasional Masa Reformasi*”. Pada tahap ini peneliti memilih data atau sumber yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan sumber dengan tujuan untuk menentukan fakta- fakta sejarah.

Setelah melakukan kritik sumber peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *interpretasi* atau penafsiran terhadap suatu fakta. Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap fakta- fakta yang diperoleh, kemudian dianalisis adanya keterkaitan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Setelah itu dilakukan penggabungan- penggabungan terhadap fakta- fakta dengan tujuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang akan

dibahas. Sebagai penguat analisis, dalam penelitian ini menggunakan suatu teori untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yaitu teori restrukturisasi perbankan untuk melihat perjalanan Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Pembangunan Indonesia sebelum dimerges.

Tahap yang terakhir yaitu *historiografi*. Pada tahap ini setelah berhasil menginterpretasi fakta- fakta yang berkaitan dengan tema penulis menulis fakta- fakta tersebut sebagai hasil penelitian sejarah tentang “*Restrukturisasi Perbankan Nasional Masa Reformasi*”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. KONDISI PERBANKAN NASIONAL MASA ORDE BARU (1983-1998)

#### a. Perkembangan Perbankan Tahun 1983-1988

Keberhasilan kebijakan Pakjun<sup>12</sup> melahirkan kebijakan baru yaitu Paket Kebijakan Oktober 1988. Paket kebijakan ini memberikan kemudahan bagi bank (pemerintah, pembangunan, swasta, maupun koperasi) dalam membuka kantor cabang bank di seluruh Indonesia. Dengan syarat minimal 20 bulan termasuk dalam kategori bank yang sehat, diperbolehkan membuka kantor cabang bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB diberikan izin untuk menerbitkan sertifikat deposito yang tidak diperlukan izin lagi dari Departemen Keuangan maupun dari Bank Indonesia. Pendirian bank umum, bank pembangunan oleh swasta nasional, dan

<sup>12</sup> Pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983 atau yang dikenal dengan Pakjun, bank diberikan kebebasan dalam mengatur suku bunga deposito, tabungan maupun kredit. Pada Juni 1983 pemerintah menghapus sistem tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan mobilisasi dana dan efisiensi sumber daya, pengapusan pagu kredit atau pagu aktivo neto, mengurangi pemebrian kredit likuiditas oleh Bank Sentral dan pemberian likuiditas tersebut hanya pada sektor tertentu yang mempunyai prioritas tinggi. Thomas, Suyatno DKK, *Dasar-dasar Pengkreditan*, (Jakarta: PT Pramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 2.

<sup>11</sup> *Ibid*

koperasi, dengan syarat modal minimal Rp 10 miliar. Pendirian Bank Pengkreditan Rakyat beserta cabangnya dengan modal minimal Rp 50 juta. Semua bank dapat menyelenggarakan program tabungan pembangunan nasional. Kemudahan oprasinya bank devisa, kemudahan mendirikan bank campuran, kemudahan bagi bank asing dalam membuka cabangnya dengan syarat sebagai bank yang tergolong sehat, penyempurnaan mekanisme *swap*<sup>13</sup>, memperlonggar izin usaha perdagangan valuta asing yang sebelumnya hanya satu tahun menjadi tanpa batas dengan syarat tidak melakukan penyimpangan. Keuntungan dari masa transisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih banyak menggunakan jasa perbankan.<sup>14</sup>

#### b. Perkembangan Perbankan Tahun 1988-1998

Pakto 88 tersebut, berdampak pada Jumlah bank yang membengkak jumlahnya menjadi 277 bank umum dan 8.058 bank pengkreditan rakyat dengan jumlah total mencapai 8.285 bank, sehingga pemerintah pada tahun ini membatasi jumlah bank yang beroperasi. Pembukaan bank bank baru tersebut tanpa disertai dengan SDM yang kuat.<sup>15</sup> Sehingga menyadari hal itu, Pemerintah melakukan penyempurnaan atas paket kebijakan 88 yang diatur dalam paket 28 Februari 1991 tentang penyempurnaan, pengawasan, dan pembinaan bank. Penyempurnaan tersebut berisikan tentang: persyaratan perizinan, kepemilikan dan pengurusan bank, pedoman oprasional dan kehati-hatian dalam permodalan, penilaian tingkat kesehatan bank, dan faktor penunjang untuk pengembangan usaha bank.<sup>16</sup>

Banyak bank yang melanggar aturan, baik bank yang dilikuidasi dalam tahapan BBO (Bank Beku Operasi), maupun yang bank yang dalam pengawasan BPPN. Beberapa bank yang masuk dalam

perawatan BPPN yaitu : tujuh bank yang dibekukan yaitu Bank Kredit Asia, Bank Centris Internasional, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Hokindo Bank dan Bank Surya. Alasan ketujuh bank tersebut dibekukan adalah karena menggunakan BLBI sebanyak 500% yang melebihi 75% dari aset yang dimiliki. Dan tujuh bank yang diizinkan beroperasi tetapi didampingi oleh bank empat bank BUMN yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tujuh bank yang masuk dalam BPPN ialah Bank Danamon, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUM), Bank Modern, Bank Tiara Asia, Bank Exim dan PDFCI. Alasan mereka diawasi oleh BPPN ialah karena menggunakan dana BLBI sebanyak 2 triliun yang dana tersebut melebihi 500% dari modal yang disetor.<sup>17</sup> Sementara pelanggaran yang dilakukan tersebut berupa pemberian kredit kepada grupnya sendiri. Seperti Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memberikan kredit kepada kelompoknya sendiri sebesar 90,7% atau sekitar 24 triliun.<sup>18</sup>

#### c. Kesehatan Perbankan Setelah Pakto 88

Setelah dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah dan berbagai kebijakan perbankan berdampak pada persaingan antara bank swasta nasional, bank pemerintah dan bank swasta asing dalam hal perebutan pangsa pasar. Sebelum dikeluarkannya Pakto 88 tepatnya pada tahun 1985 bank pemerintah memperoleh keuntungan dari dana pihak ketiga sebesar 64,02% dan bank swasta nasional memperoleh keuntungan sebesar 22,55%. Dari segi penyaluran kredit bank pemerintah mencapai 72,54 % (Rp 15,374 triliun) dan kelompok bank swasta mencapai 19,37% (4,11 triliun). Setelah diterapkannya Pakto 88 tepatnya tahun 1991 bank swasta nasional memperoleh dana pihak ketiga sebesar 45,36 % (Rp

<sup>13</sup> *Swap* merupakan tukar menukar suatu valuta dengan valuta lain atas dasar kurs yang disepakati guna mengantisipasi pergerakan nilai tukar pada masa yang akan datang, (Ralona M, kamus istilah ekonomi populer, (Jakarta: gorga media, 2006), hlm. 295)

<sup>14</sup> Thomas, Suyatno DKK, *Op.cit.*, hlm.3.

<sup>15</sup> Budi santoso, *Op. cit.*, hlm. 47.

<sup>16</sup> Thomas, Suyatno DKK, *Op. cit.*, hlm. 3

<sup>17</sup>Sanjoto, *Reformasi Dalam Perspektif Sanjoto*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.296

<sup>18</sup> Laporan Tahunan Bank Indonesia, *Perekonomian Indonesia Tahun 1997/1998*, hlm. 20.

431,142 triliun) dan kelompok bank pemerintah memperoleh 43,96% (Rp 41,812 triliun). Dari segi penyaluran kredit tepatnya tahun 1995, bank swasta nasional mencapai 47,59% dan bank pemerintah 39,84% dan bank asing serta bank campuran memperoleh 10,33% sementara bank pembangunan daerah memperoleh 2,23%. Di tahun yang sama, yaitu tahun 1995 bank swasta nasional memperoleh dana masyarakat sebesar 54,69% sedangkan bank pemerintah memperoleh 35,35%.<sup>19</sup>

Melihat perjalanan bank pemerintah dan bank swasta nasional sebelum diterapkannya Pakto 88, bank pemerintah selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada bank swasta nasional baik dari segi dana pihak ketiga maupun dari penyaluran kredit. Tetapi, setelah diterapkannya Pakto 88 menjadikan bank swasta nasional lebih bergerak cepat sehingga setelah diterapkannya Pakto 88 tersebut, bank swasta nasional lebih unggul dibandingkan dengan bank pemerintah. Keadaan tersebut juga didukung oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah karena beberapa bank pemerintah yang banyak masuk dalam BPPN sehingga banyak masyarakat yang mengalirkan dananya kepada kelompok bank swasta nasional.

#### d. Kredit Macet Perbankan

Kredit macet yang terjadi sepanjang tahun 1990-an terutama tahun 1997/1998, disebabkan oleh adanya krisis moneter dan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kredit macet, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh: kebijakan pengkreditan yang ekspansif, penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur pengkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta

menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.<sup>20</sup>

Selain dua faktor diatas, bank juga harus memenuhi syarat minimal kredit yang harus dipenuhi. Bank- bank yang tercatat sebagai Bank Beku Operasi (BBO), Bank *Take Over* (BTO), dan dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah disebutkan di atas, melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 20% dari modal bagi debitur individual dan 50% untuk debitur kelompok. Sepanjang tahun tersebut banyak bank yang melanggar peraturan BMPK yang ditetapkan seperti halnya Bank Danamon yang memberikan kreditnya pada kelompoknya sendiri sebesar 43,8%, Bank Umum Nasional sebesar 78,4% . Oleh karena itu pemerintah mengubah ketentuan BMPK yaitu 50% dari modal bank pada Mei 1993 menjadi 35% pada Desember 1995 dan menjadi 20% pada Maret 1997.<sup>21</sup> Kasus lain BMPK yang dilakukan oleh BAPINDO yang menyalurkan kreditnya ke kelompoknya dengan jumlah yang relatif besar. Kredit yang disalurkan BAPINDO sebesar 800 milyar rupiah kesalah satu debiturnya. Secara teknis perbankan, panyaluran kredit seharusnya maksimal 120 milyar (20% dari modal BAPINDO sebesar 600 milyar).<sup>22</sup>

#### e. Ketetapan CAR Setelah Pakto 88

Rasio kecukupan modal merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung risiko, seperti kredit yang diberikan.<sup>23</sup>

Ketentuan penyediaan modal minimum bank setelah paket 88 tepatnya dalam kerangka paket kebijakan 29 Februari 1991 yang disesuaikan dengan standar *Bank For*

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 38.

<sup>21</sup> Sunarsip, *Analisis atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia dengan pendekatan Teori Polizatto dan William E. Alexander*, hlm. 11. (<http://www.iei.or.id/publicationfiles/Analisis%20atas%20Deregulasi,%20Krisis,%20dan%20Restrukturisasi%20Perbankan%20di%20Indonesia.pdf>), Diakses tanggal 4 Maret 2017.

<sup>22</sup> Erni Karyati, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>23</sup> M. Handry Imansyah, *Krisis Keuangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009),hlm. 54.

<sup>19</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 109-110.

*International Settlements* (BIS) bahwa Bank Indonesia mewajibkan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Tetapi pada saat krisis moneter berlangsung ketentuan tersebut diturunkan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi 4%. Penurunan CAR tersebut bertujuan untuk mengantisipasi bank- bank yang masuk dalam program rekapitalisasi perbankan agar dapat memenuhi rasio kecukupan modalnya. Keputusan tersebut kemudian dihapus sejak berlakunya PBI No.3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum sebesar 8%.

**B. PERBANKAN INDONESIA SEBELUM RESTRUKTURISASI**

**a. Bank Dagang Negara**

Bank Dagang Negara awalnya adalah milik pemerintahan Hindia Belanda, yang didirikan tahun 1857 dan bernama *De Nederlandsche Indische Maatschappij* atau biasa disebut *Escompto Bank*. Bank *Escompto* bergerak di bidang pembiayaan perkebunan dengan tujuan untuk membiayai usaha perkebunan di Indonesia. Tetapi pada perkembangannya bank *escompto* juga bergerak dalam bidang perdagangan.<sup>24</sup>

**Tabel 3.4 Laporan Keuangan Bank Dagang Negara Tahun 1994-1998**

Tahun	CAR	Rentabilitas		Likuiditas
		ROA	ER	LDR
1994	17,59 %	12,34 %	1991.50%	95.22%
1995	29,58 %	11,92 %	1942.02%	95.10%
1996	32,72 %	11,72 %	1525.79%	93.85%
1997	27,75 %	17,31 %	2212.07%	95.67%
1998	-79,30 %	-106,59 %	-234.41%	174.74%

Sumber: Laporan Publikasi liputan khusus perbankan, kontan.co.id, Diakses tanggal 4 April 2017.

Rasio kecukupan modal Bank Dagang Negara dari tahun 1994-1997 mengalami naik turun, terlebih pada tahun 1998 yang turun drastis sampai dengan -79,30%. Begitupun dengan ROA atau perolehan laba atas sejumlah aset yang dimiliki bank juga mengalami naik turun sampai pada titik

terlemah yaitu -106,59%. Sementara untuk tingkat likuiditas yang ditetapkan maksimal 110%. Likuiditas tahun 1994-1997 masih dalam kategori aman karena di bawah ketentuan. Tetapi, tahun 1998 tingkat likuiditas bank berada di atas 110%. LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya.

**b. Bank Bumi Daya**

Bank Bumi Daya berasal dari Bank Negara Indonesia Unit IV. Bank Negara Indonesia Unit IV didirikan berdasarkan pada Undang- undang No 1 PP tahun 1959. Tetapi setelah dikeluarkannya Undang- undang No 19 Tahun 1968 didirikan bank milik Negara yang menampung segala hak, kewajiban, kekayaan dari Bank Negara Indonesia Unit IV yaitu bank Bumi Daya.<sup>25</sup>

**Tabel 3.8 Laporan Keuangan Bank Bumi Daya Tahun 1994-1998**

Tahun	CAR	Rentabilitas		Likuiditas
		ROA	ER	LDR
1994	12,24 %	4,56 %	1766.70%	94.64%
1995	24,24 %	4,58 %	1841.32%	94.85%
1996	31,27 %	4,22 %	1471.97%	93.64%
1997	20,48 %	5,00 %	938.34%	90.37%
1998	-39,57 %	-127,91 %	-422.96%	130.96%

Sumber : Laporan Publikasi liputan khusus perbankan, kontan.co.id, Diakses tanggal 4 April 2017.

Rasio kecukupan modal Bank Bumi Daya dari tahun 1994-1996 mengalami peningkatan. Tetapi mulai tahun 1997-1998 CAR Bank Bumi Daya mengalami penurunan sampai pada -39,57%. Hal tersebut juga diimbangi dengan ROA bank yang naik turun. Tahun 1995 ROA naik turun kembali pada tahun 1996, naik kembali pada tahun 1997 dan turun kembali pada level yang drastis yaitu -127,91%. Sementara untuk tingkat likuiditas yang ditetapkan maksimal 110%. Likuiditas tahun 1994-1997 masih dalam kategori aman karena di bawah ketentuan. Tetapi, tahun 1998 tingkat likuiditas bank berada di atas 110%. LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga

<sup>24</sup> O.P. Simorangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989), hlm.29.

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17.

bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya.

### c. Bank Ekpor Impor (EXIM)

Bank Ekpor Impor Indonesia atau yang biasa disebut Bank Eksim merupakan bank yang berasal dari bank Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). NHM didirikan pada tahun 1824 oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya NHM bergerak dalam bidang perdagangan yang dalam perkembangannya NHM menjadi perusahaan perbankan yang membiayai sektor perkebunan.<sup>26</sup>

**Tabel 3.12 Laporan Keuangan Bank Exim Tahun 1994-1998**

Tahun	CAR	Rentabilitas		Likuiditas
		ROA	ER	LDR
1994	31,48 %	7,50 %	1456.83%	93.58%
1995	28,64 %	10,97 %	1607.94%	94.14%
1996	26,77%	13,06 %	1588.55%	94.08%
1997	-12,62 %	-150,26 %	-1290.36%	108.40%
1998	-144,91 %	-158,91 %	-209.66%	191.19%

Sumber: Laporan Publikasi liputan khusus perbankan, kontan.co.id, Diakses tanggal 4 April 2017

Rasio kecukupan modal Bank Ekpor Impor (EXIM) dari tahun 1995-1998 terus mengalami penurunan sampai pada titik terendah yaitu -144,91%. Sementara untuk ROA dari tahun 1994-1996 terus meningkat dan mulai turun pada tahun 1997 sampai pada angka -158,91%. Sementara untuk tingkat likuiditas yang ditetapkan maksimal 110%. Likuiditas tahun 1994-1997 masih dalam kategori aman karena di bawah ketentuan. Tetapi, tahun 1998 tingkat likuiditas bank berada di atas 110%. LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya.

### d. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

Bank Pembangunan Indonesia atau yang biasanya disingkat Bapindo, merupakan bank hasil peleburan dari Bank Industri Negara (BIN). Bank Industri Negara didirikan pada

tahun 1995 yang fungsinya bergerak dalam bidang perindustrian dan pertambangan. latar belakang didirikannya BIN adalah untuk memperbaiki kondisi perindustrian dan pertambangan akibat dari Perang Dunua II. Atas dasar pertimbangan pemerintah bahwa bidang usaha BIN dapat dikelola oleh Bapindo serta untuk memperoleh proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang lebih baik, maka pada tanggal 16 Agustus 1960 ditetapkan keputusan untuk melebur BIN ke dalam Bapindo.<sup>27</sup>

**Tabel 3.16 Laporan Keuangan Bank BAPINDO Tahun 1994-1998**

Tahun	CAR	Rentabilitas		Likuiditas
		ROA	ER	LDR
1994	22,03 %	0,43 %	1209.29%	92.36%
1995	28,04 %	0,29 %	727.55%	87.92%
1996	37,04%	0,33 %	777.63%	88.61%
1997	29,62 %	14,64%	2248.53%	95.74%
1998	-30,44%	-106,76 %	-450.75%	128.51%

Sumber: Laporan Publikasi liputan khusus perbankan, kontan.co.id, Diakses tanggal 4 April 2017.

CAR Bapindo tahun 1995 dan 1996 mengalami kenaikan sampai pada angka 37,04%. Sementara untuk tahun setelahnya yaitu 1997 dan 1998 mengalami penurunan sampai pada angka -30,44%. Hal tersebut diimbangi dengan ROA yang juga mengalami naik turun. Meskipun di tahun 1994 CAR lebih rendah dari pada tahun 1995 tapi diimbangi dengan ROA yang cukup tinggi. Sementara untuk tahun 1997 yang CARnya rendah tapi diimbangi dengan ROAnya yang naik sampai pada angka 14,64%. CAR dan ROA kemudian mengalami penurunan yang drastis pada tahun 1998. Sementara untuk tingkat likuiditas yang ditetapkan maksimal 110%. Likuiditas tahun 1994-1997 masih dalam kategori aman karena di bawah ketentuan. Tetapi, tahun 1998 tingkat likuiditas bank berada di atas 110%. LDR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya.

<sup>26</sup>Simorangkir, *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>27</sup> O.P. Simorangkir, *Op.cit.*, hlm 46-47

#### e. Penggabungan Usaha Bank (Merger Bank)

Penggabungan usaha bank atau merger bank merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perbankan.<sup>28</sup> Adapun alasan Penggabungan perbankan tersebut antara lain : masalah kesehatan, permodalan, manajemen, teknologi dan administrasi, dan ingin menguasai pasar.

#### f. Latar belakang Merger Bank sebelum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri

Alasan merger selain dari kondisi permodalan yang dilihat dari APBN, Konversi Pinjaman Pemerintah tahun buku, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL) dan Konversi Dividen, perkembangan aset dan laba ke empat bank yang mengalami naik turun mulai dari tahun 1994-1998, dari sisi rasio kecukupan modal serta kredit yang mengalami penurunan sampai tahun 1998 yang menjadi titik terparahnya, sehingga keempat bank tersebut melakukan upaya menggunakan dana antar bank untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyalurkan kredit. Terlebih lagi pada tahun 1998 akibat perekonomian Indonesia yang berjalan tidak kondusif sehingga mempengaruhi kondisi perbankan yang pada tahun 1998 kondisi keempat bank tersebut permodalannya tumbuh negatif berada di bawah ketentuan modal minimum yang harus dipenuhi oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 4% .

Kondisi eksternal dari perbankan sendiri yaitu terjadinya krisis moneter tahun 1998 yang mengakibatkan pemerintah harus menyelamatkan kondisi beberapa bank, sehingga untuk menyelamatkan kondisi tersebut pemerintah melakukan program restrukturisasi perbankan yang salah satunya adalah merger. Oktober 1998 Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor (EXIM), dan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dimergikan menjadi Bank Mandiri. Tetapi, Pada bulan Juli 1999 permodalan serta lainnya baru menjadi satu ke dalam Bank Mandiri. Dengan proses penggabungan tersebut diharapkan kondisi

permodalan dan juga kinerja bank terus membaik.

#### g. Dampak Program Merger

Ditetapkannya merger keempat bank tersebut tentunya membawa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya merger tersebut terlebih pada para pegawai bank yang terkena PHK. Pengurangan jumlah pegawai dari 26.000 pegawai menjadi 8.980 pegawai tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu pegawai yang terkena PHK tersebut, diberi pesangon yang memadai yang dapat digunakan untuk berwirausaha sendiri. Sementara untuk pegawai yang tidak terkena PHK, akan melakukan seleksi yang ketat selama dua tahun. Hal tersebut bertujuan untuk menunjang performa kerja yang memuaskan yang nantinya akan menjadi pegawai yang handal.<sup>29</sup>

Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya merger tersebut adalah pada tahun 2000 Bank Mandiri sudah menunjukkan kinerjanya. Hal tersebut dapat dilihat dari peringkat Bank Mandiri atas posisinya pada perbankan di Asia yang berada di posisi rangking 73. Rangking tersebut merupakan posisi tertinggi yang dimiliki oleh perbankan Indonesia dan merupakan rangking tertinggi dari pada bank-bank lain. Bank lain seperti BNI berada di peringkat 147, BCA di peringkat 149, Bank Internasional Indonesia (BII) berada di peringkat 245, BRI berada di peringkat 277, Bank Danamon di peringkat 296, Bank Lippo di peringkat 305, Bank Lippo peringkat 305, Bank Panin peringkat 376, Bank Universal peringkat 382 dan BTN peringkat 390.<sup>30</sup>

## PENUTUP

### A. Simpulan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori restrukturisasi perbankan. Ruang lingkup dari restrukturisasi perbankan tidak hanya menangani masalah penutupan bank yang tidak solven, tetapi juga menyangkut penyehatan bank- bank yang masih solven tetapi dalam keadaan yang tidak sehat baik disebabkan karena lemahnya permodalan

<sup>28</sup> Thomas Suyanto Dkk, *Op. cit.*, hlm. 90.

<sup>29</sup> Surabaya Post, 4 Desember 1998

<sup>30</sup> Surabaya Post, Selasa 12 September 2000

maupun karena berbagai kelemahan intern bank, program memperkuat pengawasan bank, peraturan perbankan serta *corporate governance* perbankan, meningkatkan transparansi, memperkuat pengadilan dan memperbaiki ketentuan tentang kepailitan, rekapitalisasi serta restrukturisasi bank-bank milik pemerintah dan bank-bank pembangunan daerah yang sebagian besar bermasalah.

Berangkat dari teori tersebut digunakan untuk melihat perjalanan Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Pembangunan Indonesia sebelum dimerger, yang pada tahun 1998 mengalami masalah permodalan yang turun signifikan dan permasalahan penyaluran kredit kepada nasabahnya. Sehingga dari permasalahan internal ke empat bank tersebut, membuat bank tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah.

Permodalan masing-masing keempat bank yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dapat dilihat berdasarkan APBN, konversi pinjaman Pemerintah tahun buku, konversi kredit likuiditas Bank Indonesia, konversi pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL) dan konversi dividen yang turun signifikan mulai dari tahun 1992-1997. Selain itu, aset dan laba bank rasio kecukupan modal (CAR) yang berada di bawah syarat ketentuan BI sebesar 4% BDN CARnya sebesar -79,30%, BBD CARnya sebesar -39,57%, Bank Exim CARnya sebesar -144,91%, dan Bapindo Carnya sebesar -30,44%. Serta likuiditas (LDR) bank juga mengalami naik turun, sampai pada akhirnya tahun 1998 kondisi rasio kecukupan modal keempat bank sangat negatif serta LDR keempat bank yang pada tahun 1998 di atas 110%, yang mencerminkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank lebih kecil daripada kredit yang disalurkan, sehingga bank menggunakan dana antar bank untuk membiayai kreditnya. Sehingga, hal tersebut membahayakan kondisi internal perbankan dan kepercayaan masyarakat akan bank tersebut. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan kondisi perbankan pemerintah mengambil program restrukturisasi perbankan yang salah

satunya adalah melalui program merger. Pada Oktober 1998 ke empat bank tersebut dimerger menjadi satu bank, yaitu Bank Mandiri.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai Restrukturisasi Perbankan Masa Reformasi, penulis memberikan sarannya sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dan Bank Indonesia selaku pembuat kebijakan ekonomi maupun perbankan, hendaknya dalam membuat kebijakan lebih disesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik maupun global serta permasalahan yang dihadapi oleh bank umum.
2. Bagi bank, supaya menjalankan prinsip kehati-hatian yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, agar tidak terjadi permasalahan di dalam perbankan baik kredit macet, kecukupan modal yang negatif, serta lebih terbuka kepada nasabah dalam hal transparansi dana dan dalam menerapkan kebijakan, sehingga antara nasabah dan pihak bank tidak terjadi kesalah pahaman yang akhirnya menimbulkan penarikan besar-besaran dan ketidakpercayaan masyarakat untuk bekerjasama dengan perbankan.
3. Bagi masyarakat secara umum, supaya lebih cermat dalam memilih dan menentukan bank mana yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan dan bekerjasama.
4. Bagi akademisi, khususnya mahasiswa sejarah diharapkan penelitian mengenai sejarah perbankan lebih ditingkatkan supaya dapat dijadikan referensi dan pembelajaran bagi perbankan untuk kedepannya.

## C. Sumbangsih Hasil Penelitian untuk Pendidikan dan Pembelajaran Sejarah ke Depan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam membahas program pemerintah dalam menyelamatkan kondisi perbankan yaitu restrukturisasi perbankan yang salah satunya adalah merger bank. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penulisan sejarah perbankan yang mempunyai sejarah besar dari masa Hindia-Belanda sampai pada masa Reformasi yang masih sangat sedikit penulisannya.

Dalam pembelajaran sejarah penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membantu pembelajaran sejarah khususnya yang membahas tentang perekonomian Indonesia yang ada di dalam Kurikulum 2013 pada KD 3.6 sejarah wajib tentang menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan pada KD 3.7 kelas XII sejarah wajib tentang menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi. Melalui referensi penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat menganalisis kehidupan politik dan ekonomi masa transisi setelah terjadinya krisis ekonomi Indonesia masa akhir orde baru tepatnya tahun 1997/1998 serta dampak yang ditimbulkan akibat krisis tersebut pada masa awal reformasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1968 Tentang Bank Bumi Daya.  
 Undang-undang No 18 tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara.  
 UU No. 22 tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor (Exim).  
 PP No 2 Tahun 1975 Pasal 1 tentang perubahan modal dasar Bank Pembangunan Indonesia.  
 UU No 7 tahun 1992 pasal 29 ayat 1 tentang pembinaan dan pengawasan bank.  
 PP No 25 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) menjadi Perseroan.  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 tentang penyertaan

modal negara Republik Indonesia pada perusahaan Perseroan (Persero).

Tambahan berita negara RI tanggal 11/9 tahun 1992 No 73 pasal 4 tentang modal dasar perseroan.

Peta Dan Indikator Keuangan Perbankan Indonesia 31 Desember 1991-31 Desember 1995. PT Ekofin Konsulindo. Jakarta Barat.  
 Laporan Tahunan Bank Indonesia, Perekonomian Indonesia Tahun 1997/1998,

##### Koran :

*Surabaya Post*, 18 Desember 1999  
*Surabaya Post*, 4 Desember 1998  
*Surabaya Post*, Selasa 12 September 2000  
*Surabaya Post*, Senin 18 Februari 2000  
*Surabaya Post*, 5 Desember 1998  
*Surabaya Post*, Selasa 22 Februari 2000  
*Bisnis Indonesia*, 14 Mei 2001

##### Skripsi/Jurnal :

Christina Eka Yulianti. *Kinerja Keuangan Bank Mandiri Sebagai Bank Rekapitalisasi Setelah Bergabung*. Skripsi tidak diterbitkan. Depok : Universitas Gunadarma.  
 Moch. Isnaeni. 1998. *Aspek Hukum Pelaksanaan Merger Antar Bank Umum*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.  
 Silverius Bangun. 2003. *Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Pt Bank Mandiri*. Skripsi tidak diterbitkan. Duta Wacana Christian University.  
 Irdam Ahmaddan Budi Wibowo dalam Jurnal Ekubank, Volume 2 Edisi Juli 2009 "Pengukuran Efisiensi Perbankan Sebelum Dan Sesudah Merger Menggunakan Methodedata Envelopment Analysis(Dea): Studi Kasus Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Permata".  
 Erni Karyati, *Analisis Perbandingan Sistem Penilaian Kesehatan Bank Antara Surat Keputusan BI No. 23 Tahun 1993 dan Surat Keputusan BI No. 30 Tahun 1997*, Jakarta: Universitas Gunadarma.

##### Buku :

Agus Budianto. 2004. *Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat- Akibat Hukumnya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Boy Loen dan Sonny Ericson. 2007. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ghozali Masaki. 2007. "Transmisi Kebijakan Moneter ; Kajian Teoritis Dan Empiris". Malang : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UB.
- Hadi, Soesastro Dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kasmir. 2005. *Pemasaran Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo.
- Kasmir. 2011. *Dasar- dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lukman Dendawijaya. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Handry Imansyah. 2009. *Krisis Keuangan di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Neni sri imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ralona M. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: gorga media.
- Rimsky K. Judisseno. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sanjoto. 1999. *Reformasi Dalam Perspektif Sanjoto*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simorangkir ,O.P. 1989. *Dasar- dasar dan Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Soedrajat, Djwandono. 2001. *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*. Jakarta: PT LP3ES Indonesia.
- Soehandjono dan Associates. 2002. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Suhedi, Hendro. 1994. *Perubahan Status Hukum Bank- Bank Pemerintah Menjadi Persero: Lengkap dengan Anggaran dasar*". Jember: BP Jember Inti Karya.
- Tambunan ,Tulus. 2011. *Memahami Krisis : Siasat Pembangunan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Taufik Abdullah. 2003. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Thomas Suyatno, dkk. 1988. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: STIE Perbanas-Gramedia.
- Thomas, Suyatno dkk. 2007. *Dasar- dasar Pengkreditan*. Jakarta: PT Pramedia Pustaka Utama.
- Zainul, Arifin. 2009. *Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.

#### Sumber Internet:

Sunarsip, *Analisis atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia dengan pendekatan Teori Polizatto dan William E. Alexander*, hlm.11.(<http://www.iei.or.id/publicationfiles/Analisis%20atas%20Deregulasi,%20Krisis,%20dan%20Restrukturisasi%20Perbankan%20di%20Indonesia.pdf>), Diakses tanggal 4 Maret 2017.

Laporan Publikasi liputan khusus perbankan, [kontan.co.id](http://kontan.co.id), Diakses tanggal 4 April 2017.